

PROSPEK DAN ARAH PENGEMBANGAN AGRIBISNIS KAKAO



an
Imur



Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Departemen Pertanian
2007

DAFTAR ISI

	Halaman
Sambutan Menteri Pertanian	i
Kata Pengantar	iii
Tim Penyusun	iv
Ringkasan Eksekutif	v
Daftar Isi	ix
I. PENDAHULUAN.....	1
II. KONDISI AGRIBISNIS KAKAO SAAT INI	3
A. Usaha Pertanian Primer	3
B. Usaha Agribisnis Hulu	5
C. Usaha Agribisnis Hilir	5
D. Pasar dan Harga	6
E. Infrastruktur	7
F. Kebijakan	7
III. PROSPEK, POTENSI, DAN ARAH PENGEMBANGAN	9
A. Prospek Pasar	9
B. Potensi Lahan	12
C. Arah Pengembangan	13
IV. TUJUAN DAN SASARAN PENGEMBANGAN	15
A. Tujuan	15
B. Sasaran	15
V. KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENGEMBANGAN	17
A. Kebijakan Jangka Panjang 2025	17
B. Kebijakan dan Program Jangka Menengah (2007-2010).....	18
VI. KEBUTUHAN INVESTASI	23
VII. DUKUNGAN KEBIJAKAN	26



I. PENDAHULUAN

Kakao merupakan salah satu komoditas andalan perkebunan yang peranannya cukup penting bagi perekonomian nasional, khususnya sebagai penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan dan devisa negara. Disamping itu kakao juga berperan dalam mendorong pengembangan wilayah dan pengembangan agroindustri. Pada tahun 2004, perkebunan kakao telah menyediakan lapangan kerja dan sumber pendapatan bagi sekitar 1,1 juta kepala keluarga petani yang sebagian besar berada di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Selain itu, memberikan pula sumbangan devisa terbesar ketiga pada sub sektor perkebunan setelah karet dan minyak sawit dengan nilai sebesar US\$ 546 juta. Atas dasar pentingnya peran kakao, maka pemerintah telah menetapkan kakao sebagai salah satu komoditas dalam revitalisasi perkebunan.

Perkebunan kakao di Indonesia mengalami perkembangan pesat dalam kurun waktu 25 tahun terakhir dan pada tahun 2004 areal perkebunan kakao Indonesia tercatat seluas 992.191 ha. Perkebunan kakao tersebut sebagian besar (89,59%) dikelola oleh rakyat dan selebihnya 5,04% dikelola perkebunan besar negara serta 5,37% perkebunan besar swasta. Jenis tanaman kakao yang diusahakan sebagian besar adalah jenis kakao lindak dengan sentra produksi utama adalah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Disamping itu juga diusahakan jenis kakao mulia oleh perkebunan besar negara di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Dari segi kualitas, kakao Indonesia tidak kalah dengan kakao dunia dimana bila dilakukan fermentasi dengan baik dapat mencapai cita rasa setara dengan kakao yang berasal dari Ghana. Kakao Indonesia mempunyai kelebihan, yaitu tidak mudah meleleh sehingga cocok bila dipakai untuk *blending*. Sejalan dengan keunggulan tersebut, peluang pasar kakao Indonesia cukup terbuka baik ekspor maupun kebutuhan dalam negeri. Dengan kata lain, potensi untuk menggunakan industri kakao sebagai salah satu pendorong pertumbuhan dan distribusi pendapatan cukup terbuka.

Meskipun demikian, agribisnis kakao Indonesia masih menghadapi berbagai masalah kompleks, antara lain produktivitas kebun masih

rendah akibat serangan hama penggerek buah kakao (PBK), mutu produk masih rendah, serta masih belum optimalnya pengembangan produk hilir kakao. Hal ini menjadi suatu tantangan sekaligus peluang bagi para investor untuk mengembangkan usaha dan meraih nilai tambah yang lebih besar dari agribisnis kakao.

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran kondisi agribisnis kakao hingga saat ini, khususnya yang terkait dengan perkembangan usahatani dan industri pengolahannya, prospek pasar, potensi dan peluang investasi, serta dukungan kebijakan bagi pengembangan industri kakao secara keseluruhan, termasuk program Revitalisasi Perkebunan Kakao.



II. KONDISI AGRIBISNIS KAKAO SAAT INI

A. Usaha Pertanian Primer

Tanaman kakao bukanlah tanaman asli Indonesia. Tanaman tersebut diperkirakan berasal dari lembah hulu sungai Amazon, Amerika Selatan yang dibawa masuk ke Indonesia melalui Sulawesi Utara oleh bangsa Spanyol sekitar tahun 1560. Namun sejak kapan mulai dibudidayakan masih belum begitu jelas. Ada yang berpendapat pembudidayaannya bersamaan dengan pembudidayaan kopi tahun 1820, tetapi pendapat lain mengatakan lebih awal lagi yaitu tahun 1780 di Minahasa. Pembudidayaan kakao di daerah Minahasa tersebut tidak berlangsung lama karena sejak tahun 1845 terjadi serangan hama PBK. Akibatnya kebun tidak terpelihara dan menjadi rusak.

Pada waktu budidaya kakao di Minahasa mengalami kehancuran, tanaman kakao mulai menarik perhatian petani di Jawa. Perkebunan kakao telah dikembangkan di Jawa Tengah dan Jawa Timur meliputi daerah Ungaran, Salatiga, Surakarta, Kediri, Malang dan Jember. Namun sebelum mencapai kejayaannya, perkebunan kakao di Jawa juga mengalami kehancuran akibat serangan hama PBK sejak tahun 1886 dan setelah tahun 1900 praktis tidak ada lagi perkebunan kakao di Jawa.

Meskipun hama PBK terus mengancam, tetapi budidaya kakao tetap menarik perhatian petani. Membaiknya harga kakao dunia sejak awal tahun 1970-an telah membangkitkan kembali semangat petani untuk mengembangkan perkebunan kakao secara besar-besaran. Hanya dalam waktu 24 tahun, perkebunan kakao Indonesia berkembang pesat lebih dari 26 kali lipat, dari 37 ribu ha tahun 1980 menjadi 992 ribu ha tahun 2004, dan produksi meningkat lebih dari 65 kali lipat dari 10 ribu ton tahun 1980 menjadi 651 ribu ton tahun 2004 (Tabel 1).

Pada tahun 2004 tersebut, komposisi tanaman perkebunan kakao Indonesia tercatat seluas 235.565 ha (23,74%) tanaman belum menghasilkan (TBM), 689.245 ha (69,47%) tanaman menghasilkan (TM), dan 67.382/ha (6,79%) tanaman tua/rusak. Produktivitas rata-rata nasional tercatat 945 kg/ha, dimana produktivitas perkebunan rakyat (PR) sebesar 952,2 kg/ha, produktivitas perkebunan besar negara (PBN) rata-rata 861 kg/ha, dan produktivitas perkebunan besar swasta (PBS) rata-rata 889

Tabel 1. Perkembangan areal dan produksi perkebunan kakao Indonesia

Tahun	Areal (ha)				Produksi (ton)			
	PR	PBN	PBS	Jumlah	PR	PBN	PBS	Jumlah
1970	5.156	5.722	1.232	12.110	487	1.061	190	1.738
1975	5.733	10.453	1.312	17.498	801	3.074	46	3.921
1980	13.125	18.636	5.321	37.082	1.058	8.410	816	10.284
1985	51.765	29.198	11.834	92.797	8.997	20.512	4.289	33.798
1990	252.237	57.600	47.653	357.490	97.418	27.016	17.913	142.347
1995	428.614	66.021	107.484	602.119	231.992	40.933	31.941	304.866
2000	641.133	52.690	56.094	749.917	363.628	34.790	22.724	421.142
2001	710.044	55.291	56.114	821.449	476.924	33.905	25.975	536.804
2002	798.628	54.815	60.608	914.051	511.379	34.083	25.693	571.155
2003	861.099	49.913	53.211	964.223	634.877	32.075	31.864	698.816
2004*	868.928	49.976	53.287	992.191	585.955	32.881	32.042	650.878

Sumber: Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan, 2004.

Keterangan: *) data sementara

PR = Perkebunan Rakyat

PBN = Perkebunan Besar Negara

PBS = Perkebunan Besar Swasta

Pada Tabel 1 tersebut tampak bahwa perluasan areal perkebunan kakao yang begitu pesat umumnya dilakukan petani, sehingga perkebunan rakyat telah mendominasi perkebunan kakao Indonesia. Tanaman kakao ditanam hampir di seluruh pelosok tanah air dengan sentra produksi utama adalah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Maluku Utara dan Irian Jaya.

Keberhasilan perluasan areal dan peningkatan produksi tersebut telah memberikan hasil nyata bagi peningkatan pangsa pasar kakao Indonesia di kancah perkakaoan dunia. Indonesia berhasil menempatkan diri sebagai produsen kakao terbesar kedua dunia setelah Pantai Gading (*Cote d'Ivoire*) pada tahun 2002, walaupun kembali tergeser ke posisi ketiga oleh Ghana pada tahun 2003 (*International Cocoa Organization*, 2003). Tergesernya posisi Indonesia tersebut salah satunya disebabkan oleh makin mengganasnya serangan hama PBK. Pada saat ini teridentifikasi serangan hama PBK sudah mencapai 40% dari total areal kakao, khususnya di sentra utama produksi kakao dengan kerugian sekitar US\$ 150 juta per tahun.

Disamping itu, rendahnya produktivitas tanaman kakao disebabkan oleh masih dominannya kebun yang dibangun dengan benih asalan,



terutama perkebunan rakyat dan belum banyaknya adopsi penggunaan tanaman klonal. Sementara mengganasnya serangan hama antara lain disebabkan oleh belum ditemukannya klon kakao yang tahan terhadap hama PBK. Pada saat ini teknologi pengendalian hama PBK sudah diperoleh, tetapi penerapannya masih menghadapi berbagai kendala. Hal ini menjadi tantangan bagi pelaku bisnis kakao untuk segera mengatasi permasalahan hama PBK.

B. Usaha Agribisnis Hulu

Pada agribisnis hulu telah berkembang beberapa sumber benih kakao yang secara resmi tergabung dalam Forum Masyarakat Perbenihan Kopi dan Kakao (FORMABIKOKA) sehingga baik jumlah maupun kualitas benih yang disebar dapat diawasi. Namun karena adanya keterbatasan bahan tanam dan penyebaran sumber benih belum merata ke seluruh sentra produksi menyebabkan penggunaan bahan tanam asalan masih berlanjut. Hal ini memberikan peluang bagi investor untuk mengembangkan usahanya di sub sektor agribisnis hulu kakao. Peluang investasi lainnya adalah memproduksi peralatan dan sarana produksi kakao seperti pisau, gunting tanaman, gergaji, *sprayer* hama dan lain-lain.

C. Usaha Agribisnis Hilir

Produk kakao Indonesia sebagian besar dihasilkan oleh perkebunan rakyat dan umumnya tidak diolah secara baik (tidak difermentasi), sehingga kakao Indonesia dikenal bermutu rendah. Akibatnya harga kakao Indonesia dikenakan diskon (*automatic detention*) yang besarnya antara US\$ 90-150/ton khususnya untuk pasar Amerika Serikat. Diskon harga tersebut cukup memberatkan pekebun kakao dan sangat merugikan karena mengurangi nilai devisa yang diperoleh.

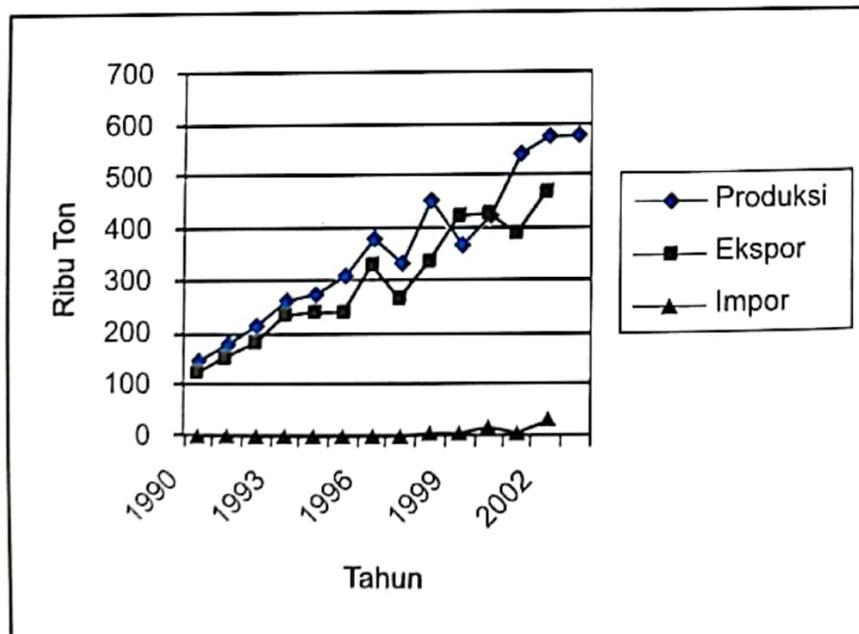
Kerugian tersebut seharusnya dapat dikurangi, bahkan nilai tambahnya dapat diraih jika industri hilir kakao Indonesia beroperasi secara optimal. Pada saat ini tercatat sebanyak 14 unit industri kakao dengan kapasitas terpasang mencapai 293.000 ton/tahun, tetapi baru dimanfaatkan sekitar 30% karena berbagai alasan. Alasan yang paling banyak dikeluhkan adalah adanya beban PPN sebesar 10%, sehingga menyebabkan tingginya harga

bahan baku. Penghapusan beban PPN sejak akhir tahun 2006 yang lalu diharapkan dapat menjadi pemicu bangkitnya industri pengolahan kakao nasional.

Sementara itu industri pengolahan skala kecil dan menengah belum berkembang, padahal sudah diperkenalkan industri pembuatan makanan dan minuman coklat rancangan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao untuk industri skala kecil dan menengah. Akibatnya ekspor kakao sebagian besar dalam bentuk produk primer sehingga nilai tambah tidak diterima oleh petani, tetapi dinikmati oleh pengusaha di negara pengimpor biji kakao.

D. Pasar dan Harga

Produksi kakao Indonesia sebagian besar diekspor dan hanya sebagian kecil yang digunakan untuk konsumsi dalam negeri. Produk yang diekspor sebagian besar (78,5%) dalam bentuk biji kering (produk primer) dan hanya sebagian kecil (21,5%) dalam bentuk hasil olahan. Tujuan utama ekspor kakao Indonesia adalah Amerika Serikat, Malaysia, Brazil dan Singapura. Di sisi lain, Indonesia juga mengimpor biji kakao yang akan digunakan untuk campuran bahan baku industri pengolahan dalam negeri. Negara asal impor biji kakao Indonesia antara lain: Pantai Gading, Ghana dan Papua Nugini. Perkembangan produksi, ekspor dan impor kakao Indonesia dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Perkembangan produksi, ekspor dan impor kakao Indonesia



Pada Gambar 1 tersebut tampak bahwa volume produksi dan ekspor kakao Indonesia terus meningkat cukup tajam, sementara volume impornya relatif stabil pada tingkat yang sangat rendah. Impor biji kakao dibutuhkan sebagai bahan pencampur bahan baku industri pengolahan kakao domestik.

Harga kakao domestik mengikuti harga kakao internasional terutama harga di bursa New York karena sebagian besar ekspor kakao Indonesia ditujukan ke Amerika Serikat. Harga kakao dunia berfluktuasi cukup tajam mulai dari US\$ 800/ton pada bulan Nopember 2000 sampai US\$ 2.239/ton pada bulan Pebruari 2003. Pada beberapa bulan terakhir harga kakao dunia relatif stabil pada kisaran US\$ 1.550-1.650/ton.

Harga biji kakao domestik bergerak mengikuti fluktuasi harga kakao dunia walaupun arahnya tidak persis sama karena pengaruh nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Secara umum harga kakao di tingkat petani beberapa tahun terakhir berkisar antara Rp 8.000-10.000/kg biji kering.

E. Infrastruktur

Sebagian besar sentra-sentra produksi kakao nasional terdapat di daerah-daerah yang jaraknya cukup terpencil dari kota besar tempat penampungan ataupun pelabuhan. Padahal jalan, dan khususnya jembatan sebagai infrastruktur yang menghubungkan sentra-sentra produksi kakao, belum terbangun dengan baik. Disamping itu, jumlah dan kualitas sarana gudang dan pelabuhan kurang memenuhi syarat untuk menjangkau sentra-sentra produksi kakao. Kondisi ini menjadi kendala bagi pengembangan agribisnis kakao khususnya pada sentra produksi yang belum memiliki pelabuhan ekspor.

Kendala lain yang dihadapi dalam pengembangan agribisnis kakao adalah masih lambatnya penyebarluasan teknologi maju hasil penelitian. Kondisi ini terutama disebabkan oleh terbatasnya tenaga penyuluh dan pembina petani serta terbatasnya dana penyebarluasan teknologi maju.

F. Kebijakan

Terdapat beberapa kebijakan yang harus diregulasi, antara lain perlu penghapusan PPN 10% terhadap transaksi lokal atas biji kakao

karena menghambat perkembangan industri pengolahan kakao dalam negeri. Selain itu, perlu pengenaan pajak ekspor untuk memacu pertumbuhan industri pengolahan kakao dalam negeri.

Kebijakan lain yang perlu segera dikeluarkan adalah kebijakan untuk pengendalian hama PBK secara nasional dan kebijakan untuk menghapuskan diskon harga (*automatic detention*) yang dikenakan terhadap ekspor biji kakao Indonesia oleh Amerika Serikat.



III. PROSPEK, POTENSI, DAN ARAH PENGEMBANGAN

A. Prospek Pasar

Kakao diproduksi oleh lebih dari 50 negara yang berada di kawasan tropis yang secara geografis dapat dibagi dalam tiga wilayah, yaitu Afrika, Asia Oceania dan Amerika Latin. Pada tahun 2006/2007, produksi kakao dunia diperkirakan sebesar 3.358 ribu ton. Wilayah Afrika memproduksi biji kakao sebesar 2.355,6 ribu ton atau 70,15% produksi dunia. Sementara Asia Oceania dan Amerika Latin masing masing memproduksi 547,5 ribu ton dan 454,7 ribu ton atau 16,31% dan 13,54% produksi dunia. Produsen utama kakao dunia adalah Pantai Gading dengan total produksi 1,32 juta ton pada tahun 2006/2007. Produsen utama lainnya adalah Ghana, Indonesia, Nigeria dan Brazil dengan produksi pada tahun 2006/2007 masing masing 550.000 ton, 445.000 ton, 200.000 ton dan 170.000 ton. Perkembangan produksi kakao negara-negara produsen utama kakao dunia dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Perkembangan produksi kakao dunia (ribu ton)

Tahun	P. Gading	Indonesia	Ghana	Nigeria	Brazil	Lainnya	Total
1998/1999	1.163	390	397	198	138	522	2.808
1999/2000	1.404	422	437	165	124	526	3.078
2000/2001	1.212	392	395	177	163	515	2.854
2001/2002	1.265	455	341	185	124	498	2.868
2002/2003	1.352	410	497	173	163	576	3.171
2003/2004	1.407	430	737	180	163	622	3.539
2004/2005*)	1.276	445	586	190	171	660	3.328
2006/2007*)	1.320	445	550	200	170	673	3.358

*) perkiraan

Sumber: ICCO, 2003. *Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics*, Vol: XXIX (2) dan Vol. XXXII (1)

Di sisi lain, konsumsi biji kakao dunia sedikit berfluktuasi dengan kecenderungan terus meningkat, sehingga beberapa tahun terakhir terjadi defisit produksi. Negara konsumen utama biji kakao dunia adalah

Belanda dengan tingkat konsumsi 460.000 ton pada tahun 2006/2007. Konsumen utama lainnya adalah Amerika Serikat, Pantai Gading, Jerman dan Brazil dengan konsumsi masing-masing 425.000 ton, 330.000 ton, 265.000 ton dan 215.000 ton. Perkembangan produksi dan konsumsi biji kakao dunia dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Perkembangan produksi, *grinding*, dan ketersediaan kakao dunia (ribu ton)

Tahun	Produksi	Grinding	Surplus/ Defisit *)	Total Cadangan	Rasio Stock/Grg
1996/1997	2.710	2.710	- 27	1.361	50,2
1997/1998	2.693	2.752	- 86	1.275	46,3
1998/1999	2.808	2.743	+ 37	1.312	47,8
1999/2000	3.077	2.960	+ 86	1.398	47,2
2000/2001	2.858	3.063	- 234	1.164	38,0
2001/2002	2.868	2.886	- 47	1.117	38,7
2002/2003	3.171	3.063	76	1.193	38,9
2003/2004	3.539	3.214	290	1.483	46,1
2004/2005	3.328	3.313	-20	1.463	44,1
2006/2007*)	3.358	3.411	- 87	1.376	40,3

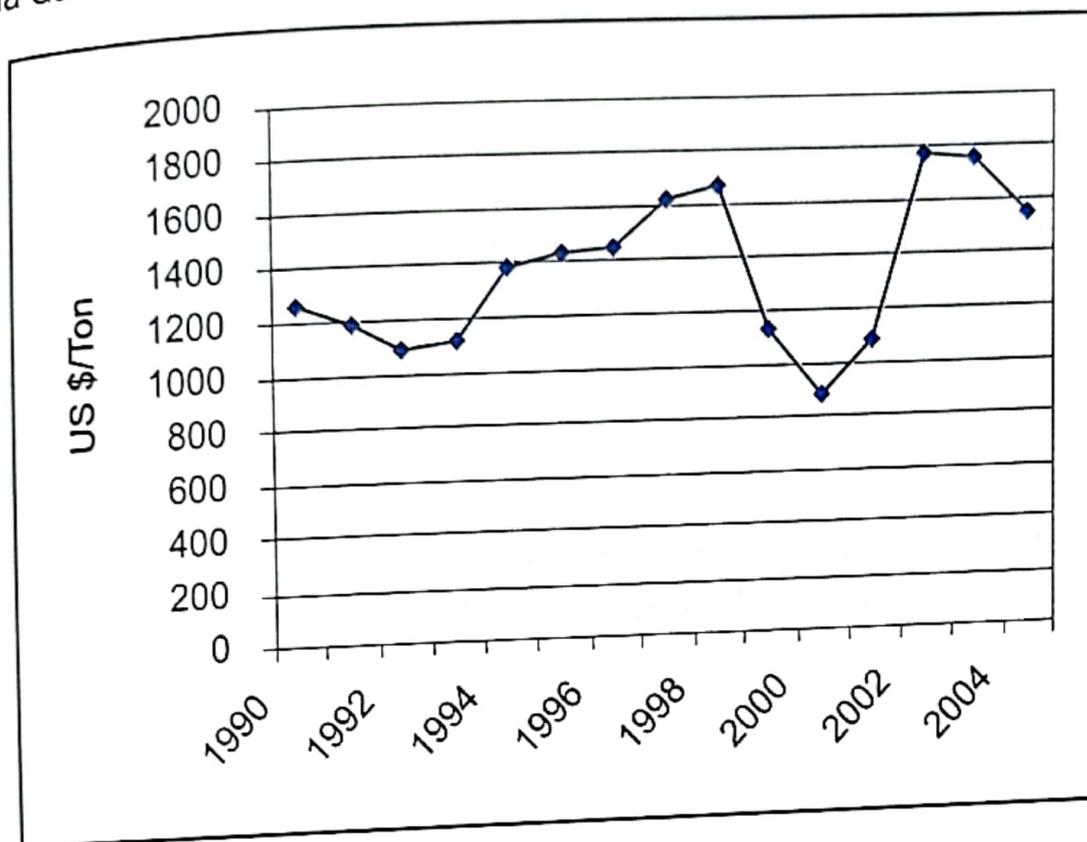
*)perkiraan **) Susut 1% dari produksi.

Sumber: ICCO, 2006 Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics, Vol: XXXXII (1).

Pada Tabel 3 tersebut tampak bahwa produksi kakao dunia mengalami penurunan cukup tajam pada tahun 2000/2001 setelah produksi kakao dunia melampaui 3 juta ton tahun 1999/2000. Sebaliknya pengolahan (*grinding*) biji kakao terus meningkat, sehingga terjadi defisit ketersediaan kakao dunia sebesar 234 ribu ton. Defisit cadangan kakao dunia tersebut terus berlanjut pada tahun 2001/2002 yaitu sebesar 47 ribu ton. Akibatnya rasio stock/pengolahan mencapai titik terendah selama 16 tahun terakhir yaitu sebesar 38,0% dan harga kakao dunia mulai bangkit setelah terpuruk ketitik terendah selama 30 tahun pada tahun 2000.

Harga kakao dunia (indikator ICCO) merambat naik menembus US\$ 1.000/ton pada bulan Pebruari 2001, kemudian sedikit berfluktuasi hingga mencapai tingkat tertinggi pada bulan Desember 2001 yaitu US\$ 1.336,79/ton. Kenaikan harga kakao dunia terus berlanjut hingga menembus US\$ 2.000/ton pada bulan September 2002 dan mencapai puncaknya pada pertengahan Oktober 2002 yaitu US\$ 2.205,26/ton. Selanjutnya harga kakao dunia kembali melemah hingga bulan Juni

2004 dan sedikit menguat pada awal tahun 2007. Harga kakao dunia di awal tahun 2007 berkisar antara US\$ 1.550-1.658/ton. Pergerakan harga kakao dunia sangat dipengaruhi oleh rasio stock/pengolahan biji kakao dunia. Perkembangan harga kakao dunia (indikator ICCO) dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Perkembangan harga kakao dunia (Indikator ICCO)

Harga kakao dunia mempunyai keterkaitan yang sangat kuat dengan harga kakao domestik. Hal ini disebabkan pedagang kakao di sentra-sentra utama produksi kakao Indonesia seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara menggunakan harga bursa New York sebagai acuan dalam menetapkan harga kakao di tingkat petani. Dengan tingkat harga sekitar US\$ 1.500/ton di bursa New York, harga kakao di tingkat petani berkisar antara Rp. 9.000-10.000/kg biji kering.

Keseimbangan produksi dan konsumsi kakao dunia tersebut diperkirakan terus berlanjut, bahkan lebih cenderung mengalami defisit karena beberapa negara produsen utama menghadapi berbagai kendala dalam upaya meningkatkan produksinya untuk mengimbangi kenaikan konsumsi. Pantai Gading menghadapi masalah karena ada keharusan untuk mengurangi subsidi dan kestabilan politik dalam negeri. Ghana dan Kamerun juga menghadapi masalah subsidi dan insentif harga dari

pemerintah. Sedangkan Malaysia menghadapi masalah ganasnya serangan hama PBK dan adanya kebijakan untuk berkonsentrasi ke kelapa sawit.

Kondisi tersebut sangat menguntungkan Indonesia, karena animo masyarakat untuk mengembangkan perkebunan kakao beberapa tahun terakhir sangat besar, disamping itu sumberdaya lahan masih tersedia. Keinginan masyarakat tersebut dapat terwujud dengan mengandalkan pendanaan sendiri. Areal perkebunan kakao berkembang rata-rata hampir 10% per tahun selama lima tahun terakhir dan hal tersebut merupakan suatu tingkat pertumbuhan yang sangat besar pada posisi areal perkebunan kakao mendekati sejuta hektar.

Namun percepatan perluasan areal yang dimulai sejak awal tahun 1980-an tersebut kurang mendapat dukungan dari sub sistem pengadaan sarana produksi dan pengembangan industri hilirnya. Akibatnya, kebun yang berhasil dibangun produksinya relatif masih rendah dan sebagian besar produksinya dipasarkan dalam bentuk produk primer. Kondisi ini membuka peluang bagi para investor untuk berperan dalam upaya peningkatan potensi kebun dan pengembangan industri hilir kakao.

Keterlibatan investor sangat diharapkan untuk mengembangkan dan membenahi agribisnis kakao, sehingga posisi dan daya saing kakao Indonesia di pasar internasional dapat terus ditingkatkan. Indonesia yang saat ini berada pada posisi ketiga produsen kakao dunia dapat menjadi produsen utama kakao dunia jika kondisi kebun dapat diperbaiki, hama PBK dapat diatasi dan mutu produk dapat diperbaiki. Perbaikan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai upaya terutama rehabilitasi kebun, peremajaan dan perluasan areal disamping perbaikan mutu produk dan pengembangan industri hilirnya.

B. Potensi Lahan

Pengembangan usaha perkebunan kakao membutuhkan ketersediaan lahan yang luas, tenaga kerja yang cukup, modal dan sarana serta prasarana yang memadai. Indonesia masih memiliki lahan yang cukup luas untuk pengembangan perkebunan kakao. Pengembangan agribisnis kakao ke depan lebih diprioritaskan pada upaya rehabilitasi dan peremajaan untuk meningkatkan produktivitas kebun kakao, disamping terus melakukan

perluasan. Pengembangan agribisnis kakao difokuskan terutama di sentra-sentra perkebunan kakao yang ada saat ini, yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Maluku dan Irian Jaya. Lahan yang tersedia dan sesuai untuk pengembangan kakao masih sangat besar yaitu sekitar 6,23 juta ha yang tersebar di 10 propinsi (Tabel 4).

Tabel 4. Potensi Lahan yang sesuai untuk pengembangan kakao

No.	Propinsi	Areal Lahan (ha)
1.	Nangroe Aceh Darussalam	152.169
2.	Sumatera Utara	195.483
3.	Jawa Timur	12.169
4.	Nusa Tenggara Timur	81.646
5.	Kalimantan Timur	1.574.150
6.	Sulawesi Tengah	807.714
7.	Sulawesi Selatan	52.856
8.	Sulawesi Tenggara	320.387
9.	Maluku	584.686
10.	Papua (Irian Jaya)	2.443.853
Jumlah		6.225.113

Sumber: Balai Besar Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian, 2007

C. Arah Pengembangan

Pada saat ini kecenderungan perluasan areal kakao terus berlanjut, walaupun tidak setajam periode 1985-1995 yang laju perluasannya rata-rata diatas 20% per tahun dan periode 1995-2002 yang rata-rata tumbuh 7,5% per tahun. Dengan kondisi areal yang ada dan masalah serangan hama PBK yang cenderung terus meluas maka produksi kakao nasional dapat menurun dalam satu dasawarsa mendatang. Hal ini disebabkan karena peningkatan produksi dengan perluasan areal saat ini tidak dapat mengimbangi penurunan produksi tanaman tua dan tua renta, serta serangan hama PBK sudah menjadi ancaman bagi produksi kakao nasional. Oleh karena itu upaya perbaikan perlu segera dilakukan agar produksi kakao nasional dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan. Perbaikan

perkebunan kakao dapat dilakukan melalui upaya rehabilitasi, peremajaan dan perluasan areal dengan bahan tanam unggul dan penerapan teknologi maju. Disamping itu, upaya penendalian hama PBK perlu terus digalakkan.

Dengan melakukan berbagai upaya perbaikan tersebut maka perluasan areal perkebunan kakao diharapkan terus berlanjut. Pada periode 2007-2010, areal perkebunan kakao diperkirakan masih tumbuh dengan laju 2,5% per tahun sehingga total areal perkebunan kakao diharapkan mencapai 1.105.430 ha dengan total produksi 730.000 ton. Pada periode 2010-2025 diharapkan pertumbuhan areal perkebunan kakao Indonesia terus berlanjut dengan laju 1,5% per tahun, sehingga total arealnya mencapai 1.354.152 ha pada tahun 2025 dengan produksi 1,3 juta ton.

Secara ringkas arah pengembangan agribisnis kakao adalah sebagai berikut:

- Rehabilitasi kebun dengan menggunakan bibit unggul dengan teknik sambung samping;
- Peremajaan kebun tua/rusak dengan bibit unggul;
- Perluasan areal pada lahan-lahan potensial dengan menggunakan bibit unggul;
- Peningkatan upaya pengendalian hama PBK;
- Perbaikan mutu produksi sesuai dengan tuntutan pasar;
- Pengembangan industri pengolahan hasil mulai dari hulu sampai hilir, sesuai dengan kebutuhan;
- Pengembangan sub sistem penunjang agribisnis kakao yang meliputi: bidang usaha pengadaan sarana produksi, kelembagaan petani dan lembaga keuangan; dan
- Pengembangan usahatani terpadu dengan mengintegrasikan ternak pada perkebunan kakao.



IV. TUJUAN DAN SASARAN PENGEMBANGAN

A. Tujuan

Tujuan umum pengembangan agribisnis kakao adalah terwujudnya agribisnis kakao berdaya saing kuat yang dicirikan oleh produktivitas tinggi, mutu produk yang baik, dan mampu menghasilkan produk dengan jumlah dan ragam sesuai dengan permintaan pasar. Hal tersebut sesuai dengan visi dan misi pembangunan perkebunan serta memperhatikan prospek, potensi dan peluang yang ada.

Secara rinci tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan produksi kakao lewat perluasan areal tanam maupun produktivitas perkebunan kakao;
2. Meningkatkan upaya pengendalian hama penggerek buah kakao;
3. Meningkatkan mutu produk kakao secara nasional;
4. Mendorong terwujudnya agribisnis perkebunan yang terintegrasi dengan berbagai cabang usaha lain yang sesuai;
5. Meningkatkan pendapatan pekebun kakao;
6. Memperkuat subsistem pengadaan sarana produksi;
7. Mengoptimalkan pemanfaatan kapasitas terpasang industri pengolahan;
8. Mempercepat pengembangan industri hilir kakao.

B. Sasaran

Berdasarkan tujuan tersebut maka dalam jangka panjang (2007-2025) sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Produktivitas tanaman pada tahun 2025 diproyeksikan menjadi 1,3 ton/ha/tahun;
2. Produksi kakao pada tahun 2025 diproyeksikan menjadi 1,4 juta ton/tahun dari areal 1,6 juta ha;
3. Pada tahun 2025 sekitar 80% dari total areal tanam diproyeksikan berupa tanaman unggul;

4. Jumlah dan jenis produk yang di ekspor meningkat dan beragam. Ekspor sebesar 1,3 juta ton/thn, berupa produk primer 390 juta ton, dan produk turunan (setra biji) 910 juta ton/tahun;
5. Konsumsi per kapita diharapkan dapat mencapai 400 g/kapita;
6. Jenis produk yang diekspor beragam dan jumlahnya meningkat;
7. Terciptanya sistem usahatani terpadu khususnya kebun kakao dan ternak serta usahatani lainnya yang sesuai;
8. Pendapatan petani pada tahun 2025 diproyeksikan US\$ 2.000/tahun (termasuk pendapatan dari diversifikasi usaha);
9. Harga produk ditingkat petani pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar 85% dari harga FOB dan loko pabrik dalam negeri;
10. Petani telah dikonsolidasikan kedalam kelembagaan yang efektif (*corporate community*);
11. Tersedianya input produksi secara lokal khususnya bibit unggul, pupuk, dan sarana produksi lainnya;
12. Tumbuh dan berkembangnya industri pengolahan biji kakao skala kecil di pedesaan dan industri hilir kakao berskala besar;
13. Kelembagaan di tingkat nasional (*Cocoa Board*) sudah berjalan mantap.

Sementara itu, dalam jangka menengah (2007-2010) sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Produktivitas tanaman pada tahun 2010 diproyeksikan menjadi 1,1 ton/hektar/tahun;
2. Produksi kakao pada tahun 2010 diproyeksikan menjadi 0,865 juta ton/tahun dari areal 1,3 juta ha;
3. Pada tahun 2010 sekitar 30% dari total areal tanam diproyeksikan berupa tanaman unggul;
4. Pendapatan petani pada tahun 2010 diproyeksikan US\$ 1.500/tahun;
5. Konsumsi per kapita diharapkan dapat mencapai 200 g/kapita;
6. Harga produk ditingkat petani pada tahun 2010 diproyeksikan sebesar 75% dari harga FOB dan loko pabrik dalam negeri;
7. Penerapan *good agricultural practices*;
8. Petani telah dikonsolidasi kedalam kelembagaan koperasi.



V. KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENGEMBANGAN

A. Arah Kebijakan Jangka Panjang 2025

Untuk mencapai sasaran jangka panjang yang telah diuraikan di atas, maka kebijakan dan program yang akan ditempuh dalam pengembangan agribisnis kakao adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan peningkatan produktivitas dan mutu kakao

Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tanaman serta mutu kakao secara bertahap, baik yang dihasilkan oleh perkebunan rakyat maupun perkebunan besar. Penerapan kebijakan peningkatan produktivitas dan mutu kakao ditempuh antara lain melalui:

- a. Optimasi kegiatan penelitian, khususnya untuk memperoleh klon kakao tahan PBK, produktivitas tinggi, kadar lemak tinggi dan ukuran biji besar baik melalui upaya eksplorasi tanaman kakao yang diduga tahan PBK, maupun melalui rekayasa genetik. Sudah diperoleh beberapa jenis yang dapat diperkenalkan sebagai klon tahan PBK dan masih diperlukan uji coba lebih lanjut. Dalam rangka penyediaan benih unggul secara tepat di sentra produksi dan wilayah pengembangan kakao, maka perlu ditingkatkan peran penangkar benih yang berbasis teknologi dan kebutuhan pasar dengan model waralaba.
- b. Gerakan pengendalian hama PBK secara serius yang didukung dengan dana dan sarana yang memadai.
- c. Segera dilakukan peremajaan tanaman kakao karena sebagian besar sudah berumur lebih dari 25 tahun, dan klonalisasi tanaman kakao terutama dengan menggunakan benih unggul.
- d. Perbaikan mutu biji kakao melalui upaya perbaikan pengelolaan kebun maupun fermentasi.
- e. Penerapan secara ketat terhadap persyaratan mutu biji kakao untuk ekspor dan segera diterapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib apabila faktor-faktor pendukungnya sudah tersedia.
- f. Peningkatan kemampuan serta pemberdayaan petani dan kelembagaan usaha.
- g. Dibentuk badan khusus yang menangani permasalahan kakao secara terintegrasi (semacam *Cocoa Board*) atau Dewan Komoditas.

2. Kebijakan peningkatan nilai tambah dan pendapatan petani kakao

Kebijakan ini dimaksudkan agar ekspor kakao Indonesia tidak lagi berupa bahan mentah (biji), tapi dalam bentuk hasil olahan, sehingga nilai tambah dinikmati di dalam negeri. Kebijakan peningkatan produktivitas dan mutu kakao ini diimplementasikan lewat program-program sebagai berikut:

- a. Program pengembangan industri hilir kakao khususnya pengolahan bubuk dan kakao *butter* untuk meningkatkan nilai tambah.
- b. Program pengembangan kemitraan antara petani kakao dengan industri pengolahan di dalam negeri dan perusahaan luar negeri yang menguasai pasar kakao.
- c. Program diversifikasi di areal tanaman kakao dengan jenis tanaman keras seperti kelapa, jati dan mahoni (kegiatan *on-farm*).
- d. Program pengembangan model mediasi (perantara) untuk mempertemukan keinginan/kebutuhan pembeli dengan produk yang dihasilkan petani (kegiatan *off-farm*).
- e. Program diversifikasi produk kakao, seperti kakao bubuk, lemak, pasta, dan sebagainya.

3. Kebijakan penyediaan sumber pembiayaan

Kebijakan ini dimaksudkan untuk menyediakan berbagai kemungkinan sumber pembiayaan baik yang berasal dari lembaga perbankan maupun non-bank (antara lain memanfaatkan penyertaan dana masyarakat melalui Kontrak Investasi Kolektif, Resi Gudang dan sebagainya).

B. Kebijakan dan Program Jangka Menengah (2007 - 2010)

Untuk mencapai sasaran jangka menengah yang telah diuraikan diatas, maka kebijakan dan program yang akan ditempuh sebagai berikut:

1. Kebijakan peningkatan produktivitas

Kebijakan peningkatan produktivitas ini diimplementasikan lewat serangkaian program sebagai berikut:

- a. Program Intensifikasi Tanaman, meliputi: (i) kegiatan intensifikasi tanaman pada sentra produksi kakao rakyat, (ii) Kegiatan pengendalian hama penggerek buah kakao di wilayah yang sudah terserang dan melakukan tindakan preventif (sarungisasi buah kakao) dan kuratif bagi daerah yang belum terserang dengan memanfaatkan sistem peraturan karantina serta penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) secara maksimal serta meningkatkan kegiatan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT), dan (iii) kegiatan penggunaan benih dari varietas tahan PBK yang direkomendasikan Pusat Penelitian Kopi Kakao Indonesia.
- b. Perluasan kakao dalam rangka pengutuhan areal tetap dilanjutkan dan diutamakan untuk mengutuhkan areal mencapai skala ekonomi pada lokasi yang secara agroekologi cocok untuk pengembangan kakao, baik secara tumpang sari di antara kakao maupun pada areal tanaman baru. Bibit menggunakan jenis-jenis klon unggul yang dihasilkan oleh lembaga penelitian dan digunakan cara vegetatif dengan memanfaatkan sumber bahan tanaman dari kebun-kebun entres yang ada.
- c. Rehabilitasi dan peremajaan tanaman dilakukan pada tanaman rusak atau tanaman tua dengan cara sambung samping menggunakan klon-klon unggul disertai dengan pemeliharaan yang intensif dan efisien.
- d. Diversifikasi usaha melalui: (a) Kegiatan diversifikasi horizontal, yaitu dengan pengembangan ternak (*mixed cropping*) maupun *intercropping* tanaman lain, seperti kelapa, jati dan mahoni, dan (b) Kegiatan diversifikasi vertikal yaitu dengan pengembangan produk turunan maupun pemanfaatan hasil samping.

2. Kebijakan pemberdayaan petani

Kebijakan pemberdayaan petani diimplementasikan lewat serangkaian program sebagai berikut:

- a. Program penumbuhan kelembagaan petani dan kelembagaan usaha, khususnya di sentra-sentra produksi dan pengembangan kakao.
- b. Program penumbuhan penangkar benih dalam rangka penyediaan benih unggul kakao dikembangkan model waralaba.
- c. Program pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam rangka memanfaatkan peluang bisnis yang ada.
- d. Program peningkatan ketrampilan petani untuk mencegah meluasnya serangan hama PBK melalui kegiatan SL-PHT secara intensif.

3. Kebijakan penataan kelembagaan

Kebijakan penataan kelembagaan ini diimplementasikan lewat serangkaian program sebagai berikut:

- a. Program fasilitasi lembaga keuangan pedesaan, sehingga dapat terjangkau oleh petani pekebun.
- b. Program pengembangan dan pemantapan *networking and sharing*, khususnya CCDC (*Cooperative Commodity Development Center*).
- c. Program restrukturisasi dan pemantapan pola pengembangan.

4. Kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil

Kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil diimplementasikan lewat serangkaian program sebagai berikut:

- a. Program pengembangan dan desiminasi teknologi pengolahan hasil kakao.
- b. Program fasilitasi penyediaan sarana pengolahan hasil khususnya yang dapat dioperasikan di tingkat petani.
- c. Program peningkatan mutu hasil baik hasil utama maupun hasil lanjutan.
- d. Program penerapan SNI wajib segera dilaksanakan setelah fasilitas pendukungnya terpenuhi dan diterapkan secara disiplin baik kakao yang dipasarkan didalam negeri maupun untuk ekspor.
- e. Program pemanfaatan limbah kakao sebagai pakan ternak, dan sebagainya.



- Program peningkatan dan pemantapan kelembagaan pemasaran baik mulai pada tingkat petani sampai pemasaran ekspor.
- Program pengembangan pemasaran dalam negeri, melalui kegiatan pengembangan sistem informasi pemasaran, pengembangan sistem jaringan dan mekanisme serta usaha-usaha pemasaran. Peningkatan dan pemantapan sistem informasi pasar khususnya yang dapat diakses oleh petani kakao.
- 1. Program promosi kakao Indonesia secara ekspansif dengan memfokuskan keunggulannya seperti: "*Light breaking effect*", "*hard butter*", aroma dan cita rasa prima melalui fermentasi yang baik serta terbinaanya hubungan bisnis dan teknologi dengan institusi dan industri kakao di luar negeri.
- Program pengembangan pemasaran internasional, melalui kegiatan pengembangan analisis peluang dan hambatan ekspor serta pengendalian impor produk perkebunan, pengembangan kerjasama internasional di bidang pemasaran hasil perkebunan, peningkatan promosi dan proteksi.
- Program pengembangan sarana pengolahan hasil perkebunan, melalui kegiatan penyiapan paket usulan kebijakan yang terkait dengan pengembangan sarana pengolahan hasil perkebunan rakyat skala kecil (*mini plant*) dan skala menengah/besar, pengembangan sarana pengolahan terpadu pada komoditi perkebunan potensial di wilayah KIMBUN dan pengembangan sistem informasi manajemen sarana pengolahan hasil perkebunan.
- k. Program pengembangan sistem jaminan mutu, melalui kegiatan kerjasama dan harmonisasi untuk mengurangi dan menghilangkan hambatan ekspor, sosialisasi dan penerapan standar (SNI) dan pedoman-pedoman penerapan jaminan mutu, pembinaan sertifikasi dan lembaga pelayanan sertifikasi yang profesional, pengembangan informasi dan sumberdaya manusia pembina dan pengawas mutu yang profesional dalam fasilitasi, supervisi dan verifikasi penerapan jaminan mutu serta pembentukan jaringan pengawas mutu.

5. Kebijakan pemantapan infrastruktur

Kebijakan pemantapan infrastruktur diimplementasikan lewat serangkaian program sebagai berikut:

- a. Program peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, khususnya untuk menjangkau sentra-sentra produksi kakao.
- b. Program peningkatan sarana gudang dan pelabuhan yang menjangkau sentra produksi kakao.
- c. Program peningkatan sarana listrik dan komunikasi yang dapat diakses oleh petani perkebunan.
- d. Program pengembangan sentra-sentra pemasaran kakao (terminal agribisnis) di wilayah pengembangan kakao.



VI. KEBUTUHAN INVESTASI

Pengembangan kakao di Indonesia sudah dilaksanakan cukup lama baik oleh perkebunan rakyat, perkebunan besar negara dan perkebunan besar swasta. Dalam upaya meningkatkan produksi kakao sekaligus peningkatan pendapatan petani maupun masyarakat, pemerintah telah mengembangkan berbagai pola pengembangan perkebunan yang dibiayai dari APBN dan Bantuan Luar Negeri (BLN), antara lain melalui proyek-proyek pola Unit Pelayanan Pengembangan (UPP), Perkebunan Inti Rakyat (PIR), Perkebunan Besar (PB) dan pola Swadaya. Untuk pengembangan agribisnis kakao kedepan, kegiatannya akan lebih banyak mengandalkan inisiatif petani melalui pola swadaya. Pemerintah diharapkan lebih berperan dalam upaya pengendalian hama PBK dan percepatan perluasan adopsi teknologi budidaya maju.

Untuk melaksanakan program pengembangan agribisnis kakao tersebut dibutuhkan dana yang cukup besar yang mencakup kegiatan investasi peningkatan produktivitas kebun, biaya pengendalian hama PBK, investasi pengembangan sistem usahatani terpadu, dan pengembangan industri hilir kakao serta pembangunan infrastruktur pendukungnya termasuk kegiatan penelitian dan pengembangan hasil penelitian. Berikut ini akan diuraikan secara singkat berbagai kebutuhan biaya tersebut.

Kebutuhan biaya untuk pengembangan agribisnis kakao periode tahun 2007-2010 diperkirakan mencapai Rp. 3,97 triliun. Biaya tersebut khusus untuk peningkatan produksi dengan target rehabilitasi 36.000 ha, peremajaan 54.000 ha, dan perluasan areal 110.000 ha. Selanjutnya untuk periode 2011-2025 dengan target rehabilitasi 150 ribu ha, peremajaan 250 ribu ha dan perluasan areal 450 ribu ha diperlukan biaya mencapai Rp. 16,85 triliun. Total biaya investasi yang dibutuhkan untuk rehabilitasi, peremajaan dan perluasan kebun kakao 2007-2025 mencapai Rp. 20,82 triliun dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Kebutuhan biaya pengembangan kakao tahun 2007-2025

No.	Jenis Kegiatan	2007 - 2010		2011 - 2025	
		Areal (Ha)	Biaya (Rp. M)	Areal (Ha)	Biaya (Rp.M)
1.	Rehabilitasi Peremajaan /	36.000	360,00	150.000	1.500,00
2.	Replanting Perluasan /	54.000	1.080,00	250.000	5.000,00
3.	Ekstensifikasi	110.000	2.530,00	450.000	10.350,00
Jumlah		200.000	3.970,00	850.000	16.850,00

Investasi peremajaan dan perluasan areal perkebunan kakao dinilai layak untuk dilaksanakan. Rehabilitasi akan menghabiskan dana investasi sebesar Rp. 10 juta/ha dan akan menghasilkan NPV sebesar Rp. 15,47 juta dan B/C sebesar 1,52 pada tingkat diskonto 15%, serta IRR sebesar 29,92%. Peremajaan membutuhkan biaya investasi sebesar Rp. 20 juta/ha kebun kakao. Dengan investasi tersebut akan dihasilkan NPV sebesar Rp. 11,28 juta dan B/C sebesar 1,38 pada tingkat diskonto 15%, serta IRR sebesar 21,7%. Sementara untuk perluasan dibutuhkan dana investasi sebesar Rp. 23 juta/ha kebun kakao dan akan dihasilkan NPV sebesar Rp. 8,89 juta dan B/C sebesar 1,28 pada tingkat diskonto 15%, serta IRR sebesar 19,79%.

Untuk mengamankan produksi dari serangan hama PBK dibutuhkan dana investasi pengendalian hama PBK rata-rata Rp. 1 juta/ha, sehingga dengan target pengendalian 40% dari areal produktif dibutuhkan dana sebesar Rp. 265,3 miliar untuk periode 2007-2010 dan selebihnya Rp. 487,49 miliar untuk periode 2011-2025. Pengeluaran dana tersebut terutama diarahkan untuk peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan pembelian peralatan untuk pengendalian hama PBK. Dengan pengeluaran dana sebesar Rp. 265,3 miliar tersebut diharapkan dapat menyelamatkan kehilangan produksi sebesar 20% atau senilai Rp. 1,28 triliun/tahun pada periode 2007-2010.

Selanjutnya untuk pengembangan usahatani terpadu dibutuhkan dana untuk pembelian ternak domba dan sapi, serta pembangunan



kandang dan pembelian peralatan pendukungnya. Pengembangan usaha ternak domba atau sapi dengan sasaran 3% per tahun dari total petani kakao atau sebanyak 132 ribu KK selama 4 tahun dibutuhkan dana sebesar Rp. 660 miliar. Dengan dana investasi sebesar Rp. 5 juta per petani maka selama 4 tahun akan dihasilkan NPV sebesar Rp. 539 ribu dan B/C sebesar 1,1 pada tingkat diskonto 15% dan IRR sebesar 20,56%.

Disamping itu masih dibutuhkan biaya untuk pengembangan sub sistem pengadaan sarana produksi dan pengembangan industri hilir serta penyediaan fasilitas pendukung (infrastruktur). Biaya investasi yang dibutuhkan diperkirakan sebesar Rp. 110 miliar/tahun atau Rp. 440 miliar selama periode 2007-2010.

Dana yang diperlukan untuk merealisasikan rencana pengembangan agribisnis kakao tersebut bersumber dari dana masyarakat, pengusaha dan pemerintah. Total dana yang dibutuhkan untuk periode 2007-2010 diperkirakan mencapai Rp. 5,385 triliun, seperti terlihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Perkiraan kebutuhan biaya untuk pengembangan agribisnis Kakao, periode 2007-2010 (Rp miliar)

No.	Bidang	Masyarakat	Pengusaha	Pemerintah	Total
1.	Usahatani				
	a. Rehabilitasi	200	60	100	360
	b. Peremajaan	850	150	80	1.080
	c. Perluasan	1.780	-	750	2.530
2.	Pertanian Terpadu	500	-	160	660
3.	Pengendalian hama PBK	15	50	200	265
4.	Penelitian & Pengembangan	-	10	40	50
5.	Industri Hilir	20	150	50	220
6.	Fasilitas Pendukung	-	-	220	220
	Total	3.365	420	1.600	5.385

VII. DUKUNGAN KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pengembangan agribisnis kakao sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka perlu adanya dukungan kebijakan sebagai berikut:

- a. Mengingat serangan hama PBK sudah menjadi ancaman yang serius bagi keberlanjutan perkebunan kakao Indonesia, maka pemerintah perlu memberikan dukungan penuh pada upaya pengendaliannya.
- b. Pemerintah perlu memberikan regulasi yang kondusif untuk pengembangan industri hilir kakao, antara lain dalam bentuk kemudahan investasi, keringanan pajak serta pungutan lainnya, penurunan tarif impor bahan pendukung dan pembantu.
- c. Untuk menangani permasalahan secara terintegrasi perlu dibentuk Dewan Kakao (*Cocoa Board*) atau Dewan Komoditas Tanaman Penyegar.
- d. Dalam upaya melindungi produsen biji kakao dan konsumen makanan coklat, pemerintah perlu menetapkan regulasi bahan substitusi coklat dengan mengikuti *Codex International* yaitu tidak lebih dari 5%.
- e. Pemerintah perlu mendorong terbentuknya usaha-usaha industri coklat skala UKM dan pemasaran yang efisien.
- f. Peningkatan mutu kakao ditempuh melalui penerapan teknologi pascapanen yang berorientasi pada kebutuhan pasar.
- g. Upaya pengurangan hambatan-hambatan ekspor seperti *automatic detention* (potongan harga) regulasi lain dari negara konsumen dapat dilakukan melalui perbaikan mutu secara berkelanjutan, kerja sama antara kelompok tani dan eksportir maupun prosesor, serta menghindari publikasi yang berlebihan tentang hama dan penyakit tanaman kakao.